

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui Human Development Report tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai “a process of enlarging people’s choices” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (productivity), pemerataan (equity), keberlanjutan (sustainability), dan pemberdayaan (empowerment).

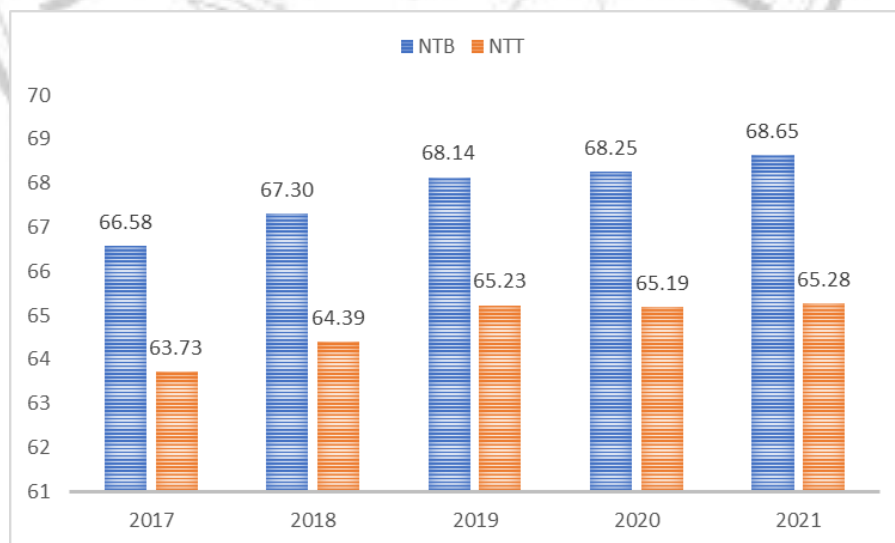
Setiap wilayah tentunya memiliki beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, antara lain seperti masalah pertumbuhan ekonomi. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena hasil pemerataan pembangunan adalah salah satu strategi dan tujuan pembangunan. Setiap wilayah daerah mempunyai upaya pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja masyarakat daerah. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama dalam mengambil inisiatif.

Pembangunan manusia adalah tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dimana pembangunan manusia memiliki peran untuk membentuk keberhasilan suatu negara dalam upaya penyerapan teknologi-teknologi yang semakin modern sebagai tujuan untuk pengembangan kapasitas individu dalam peningkatan kualitas kerja serta mengurangi angka pengangguran untuk mencapai pembangunan manusia yang terusberkelanjutan. Berdasarkan diatasnya pengangguran dan berdampak kepada peningkatan pendapatan suatu penduduk sehingga akan berdampak kepada peningkatan pembangunan manusia dengan berbagai peningkatan kualitas hidup yang berhasil dicapai seperti kebutuhan gizi, konsumsi rumah tangga dan pendidikan maka

pengurangan pengangguran dapat mengalami perubahan indeks pembangunan manusia yang semakin meningkat.

IPM adalah indikator penting untuk mengetahui keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/ masyarakat/penduduk yang dipublikasikan secara berkala oleh BPS, dan IPM merupakan indikator dampak dari program 5-10 tahun sebelumnya. Bila dilihat dari ranking, posisi IPM NTB memang tidak mengalami perubahan walaupun capaian nilainya selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena provinsi lainnya pada hakekatnya juga berupaya untuk meningkatkan nilai IPMnya. Dan untuk memenuhi ini setiap provinsi berupaya mengerahkan seluruh sumber daya (terutama anggaran) yang dimilikinya. Mengingat Provinsi NTB adalah salah satu provinsi yang memiliki kapasitas fiskal yang tidak kuat, maka provinsi ini harus meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran yang dimilikinya. Sejak 3 tahun terakhir Provinsi NTB berupaya untuk mempercepat peningkatan nilai IPMnya. Dalam jangka waktu 3 tahun terakhir (2009-2011), percepatan peningkatan IPM-NTB sebesar 2,79% yang menempatkan Provinsi NTB menempati urutan ke-6 secara nasional dari percepatan pembangunan IPM di Indonesia.

Gambar 1.1 Grafik Perbandingan IPM Dipulau Nusa Tenggara Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistika.

Dari Gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Pada tahun 2017-2021 Nusa Tenggara Barat memiliki IPM tertinggi di bandingkan dengan Nusa Tenggara Timur yang dimana Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki berbagai macam potensi yang disertai dengan keunggulannya, hal tersebut dapat dilihat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki delapan Kabupaten dan dua Kota yang terletak di wilayah kepulauan dan pegunungan. Geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di posisi jalur perdagangan pada Wiayah Timur Indonesia yaitu Surabaya dan Makasar, kemudian berada di posisi wilayah jalur wisata dunia yang terkenal yakni Bali, komodo dan Tana Toraja. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kegiatan ekonomi yang baik, hal tersebut terjadi karena adanya penambahan pada nilai barang dan jasa yang dihasilkan (Bappeda, 2020).

B. Perumusan Masalah

Untuk mengetahui bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat maka akan di bahas dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh PDRB, PAD dan Angkatan kerja terhadap IPM pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk Menganalisis Bagaimana pengaruh PDRB, PAD dan Angkatan kerja terhadap IPM pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan sebagai berikut:

- 1) Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang dan menambah wawasan serta pengetahuan agar dapat mengembangkan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

- 2) Para penelitian lain, sebagai bahan pustaka, informasi dan referensi sertasebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.
- 3) Pemerintah serta pihak-pihak terkait, sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan maupun kebijakan ekonomi terutama mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

E. Batasan Masalah

Batasan pada penelitian ini adalah tahun yang digunakan dalam penelitian ini hanya lima tahun terakhir yaitu periode 2017-2021, Daerah penelitian adalah wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai variable terikat dan PDRB, Pendapatan Daerah, Angkatan Kerja sebagai variable bebas yang digunakan dalam penelitian ini keseluruhan bersumber dari data BPS Nusa Tenggara Barat.